

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Samarinda

*Dasar Hukum  
Entitas dan  
Rencana  
Strategis*

Pengadilan Negeri Samarinda merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman di lingkungan peradilan umum, sesuai Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Entitas berkedudukan di Jalan M. Yamin Nomor 01 Samarinda, Kalimantan Timur.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Pengadilan Negeri Samarinda berkomitmen dengan visi Terwujudnya Pengadilan Negeri Samarinda yang Agung. Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan penyelesaian upaya mediasi.
2. Peningkatan penyelesaian perkara.
3. Peningkatan tertib administrasi perkara.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
5. Peningkatan kualitas pengawasan.
6. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.
7. Peningkatan pelayanan peradilan.
8. Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
9. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung.

#### A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Samarinda. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI merupakan integrasi dari berbagai aplikasi yang telah digunakan oleh Satuan Kerja (Satker). Selain integrasi aplikasi SAKTI juga dirancang berdasarkan proses bisnis SPAN

yang baru. Proses bisnis tersebut dituangkan dalam beberapa modul. Beberapa modul SPAN yang ada di SAKTI adalah:

1. Modul Penganggaran;
2. Modul Komitmen;
3. Modul Pembayaran;
4. Modul Bendahara;
5. Modul Persediaan;
6. Modul Asset Tetap.

Interkoneksi antara SPAN dengan SAKTI akan terjadi secara intensif, karena akan terjadi pertukaran/komunikasi data secara berkala antara SAKTI dan SPAN.

*Basis Akuntansi*

### **A.3. Basis Akuntansi**

Pengadilan Negeri Samarinda menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar  
Pengukuran*

### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Negeri Samarinda dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

*Kebijakan  
Akuntansi*

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Negeri Samarinda. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Samarinda adalah sebagai berikut :

*Pendapatan-  
LRA*

##### **(1) Pendapatan-LRA**

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-  
LO*

**(2) Pendapatan-LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja*

**(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban*

**(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Aset*

**(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar*

**Aset Lancar**

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
  - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

*Aset Tetap*

**Aset Tetap**

- Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah).
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2023 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 30 Juni 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2023 dan 2023. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
- Nilai Aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal

nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

*Piutang  
Jangka  
Panjang*

**Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri sipil atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

*Aset Lainnya*

**Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan penggunaan operasional entitas.

*Kewajiban*

**(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang



Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas*

## **(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Penyisihan*

## **(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

*Piutang Tak  
Tertagih*

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Penyusutan  
Aset Tetap

#### (9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

##### *Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Implementasi  
Akuntansi  
Pemerintah  
Berkas Akrua  
Pertama Kali

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrua sesuai dengan amanat PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, pos-pos ekuitas pada neraca per 30 Juni 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrua. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrua pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi  
Pendapatan  
Rp70.533.480

B.1. Pendapatan

Realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp70.533.480 atau 122,84 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp57.421.000. Pendapatan Pengadilan Negeri Samarinda terdiri dari Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin, dan pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real. Angg.
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan (425121)	0	3.278.000	100
Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin (425122)	0	32.739.308	100

Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan (425131)	57.421.000	34.516.172	60,11
Jumlah	57.421.000	70.533.480	122,84

Realisasi pendapatan 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 53,42 persen dibandingkan 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan tidak ada pendapatan sewa ATM dan Payment Point.

Perbandingan Realisasi Pendapatan  
31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2024	REALISASI 31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan (425121)	3.278.000	0	100
Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin (425122)	32.739.308	4.550.000	619,55
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (425131)	34.516.172	146.886.459	(76,50)
Jumlah	70.533.480	151.436.459	(53,42)

Realisasi Belanja Negara  
Rp13.540.519.965

B.2. Belanja

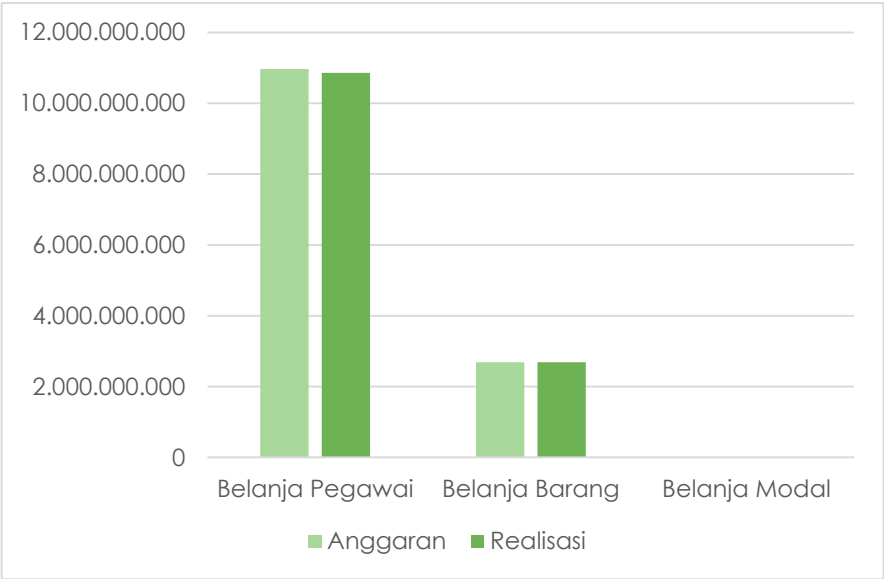
Realisasi belanja Pengadilan Negeri Samarinda pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp13.540.519.965 atau 99,19 persen dari anggaran belanja sebesar Rp13.651.107.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real. Angg.

Belanja Pegawai	10.963.203.000	10.854.178.765	99,01
Belanja Barang	2.687.904.000	2.686.341.200	99,94
Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah	13.651.107.000	13.540.519.965	99,19

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 14,98 persen dibandingkan realisasi belanja pada 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan pada tahun 2024 terdapat penambahan anggaran tunjangan pejabat Negara (hakim).

*Perbandingan Realisasi Belanja*

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2024	REALISASI 31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	10.854.178.765	9.277.601.927	16,99
Belanja Barang	2.686.341.200	2.498.217.413	7,5
Belanja Modal	0	0	0
Jumlah	13.540.519.965	11.775.819.340	14,98

Belanja Pegawai  
Rp10.854.178.765

**B.3. Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp10.854.178.765 dan Rp9.277.601.927.

Realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 16,99 persen dari 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan pada tahun 2024 terdapat penambahan anggaran belanja tunjangan pejabat negara.

*Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai  
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2024	REALISASI 31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	10.854.178.765	9.277.601.927	16,99
Belanja Lembur	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Pegawai</b>	<b>10.854.178.765</b>	<b>9.277.601.927</b>	<b>16,99</b>

Belanja Barang  
Rp2.686.341.200

**B.4. Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.686.341.200 dan Rp2.498.217.413. Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 7,5 persen dari Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023.

*Perbandingan Realisasi Belanja Barang  
31 Desember 2024 dan 2023*

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2024	REALISASI 31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1.185.150.740	1.228.796.621	
Belanja Barang Non Operasional	0	10.857.000	
Belanja Barang Persediaan	74.591.850	112.090.350	
Belanja Jasa	315.198.334	283.945.127	
Belanja Pemeliharaan	1.077.323.329	810.724.875	
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	34.076.947	51.803.440	
Jumlah Belanja Barang Kotor	2.686.341.200	2.498.757.413	
Pengembalian Belanja Barang	0	540.000	
<b>Jumlah Belanja Barang</b>	<b>2.686.341.200</b>	<b>2.498.217.413</b>	

Belanja Modal Rp0

**B.5. Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0. Hal ini disebabkan tidak ada anggaran belanja modal pada tahun 2024.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal  
31 Desember 2024 dan 2023*

	REALISASI 31 Desember 2024	REALISASI 31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0
Jumlah Belanja Modal	0	0	0

**C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**

Kas di Bendahara  
Pengeluaran Rp0

**C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran*

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Bank	0	0
Uang Tunai	0	0
Kuitansi UP	0	0
Jumlah	0	0

Piutang      Bukan  
Pajak  
Rp0

**C.2. Piutang Bukan Pajak**

Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sekitar Rp0.

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan Negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Piutang Bukan Pajak mencakup: Piutang dari Penerimaan Sumber Daya Alam, Piutang dari Pendapatan Laba BUMN, Piutang dari Pendapatan PNBP Lainnya.

Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Piutang Bukan Pajak*

Piutang Bukan Pajak	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Piutang dari Pendapatan PNBP Lainnya	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Persediaan  
Rp13.300.450

### C.3. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp13.300.450 dan Rp824.550.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan*

Persediaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Barang Konsumsi	13.300.450	824.550
<b>Jumlah</b>	<b>13.300.450</b>	<b>824.550</b>

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tanah  
Rp70.511.046..000

### C.4. Tanah



Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pengadilan Negeri Samarinda per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp70.511.046.000.

Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang atas aset tetap tanah per 31 Desember 2024.

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Tanah*

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	7.550 m2	Jl. M. Yamin, Samarinda	63.335.614.000
2	1000 m2	Jl. Pramuka, Samarinda	2.398.750.000
3	315 m2	Jl. Ramanian, Samarinda	1.199.068.000
4	646 m2	Jl. Ramanian, Samarinda	3.577.614.000
<b>Jumlah</b>			<b>70.511.046.000</b>

Mutasi nilai Tanah dapat dijelaskan sebagai berikut

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023</b>	<b>70.511.046.000</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>	<b>0</b>
<b>Mutasi Kurang :</b>	<b>0</b>
- Penghentian BMN dari penggunaan	0
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>70.511.046.000</b>
Akumulasi penyusutan s.d. 31 Desember 2024	0
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2024</b>	<b>70.511.046.000</b>

Peralatan dan  
Mesin  
Rp7.467.724.304

**C.5. Peralatan dan Mesin**

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp7.467.724.304 dan Rp8.068.303.684.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023</b>	<b>8.068.303.684</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>	<b>152.773.200</b>
<b>Mutasi Kurang :</b>	<b>753.352.580</b>
- Penghentian BMN dari penggunaan	<b>753.352.580</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>7.467.724.304</b>
Akumulasi penyusutan s.d. 31 Desember 2024	6.785.751.695
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2024</b>	<b>681.972.609</b>

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan  
Bangunan  
Rp19.135.352.400

C.6. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp19.135.352.400.

Tidak terdapat mutasi tambah maupun kurang pada aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2024.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	19,135,352,400
Mutasi Tambah :	1.148.554.000
Mutasi Kurang :	1.148.554.000
Saldo per 31 Desember 2024	19.135.352.400
Akumulasi penyusutan s.d. 31 Desember 2024	4.387.361.828
Nilai Buku per 31 Desember 2024	14.747.990.572

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya  
Rp29.533.051

C.7. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp29.533.051. Aset tetap tersebut berupa buku-buku perpustakaan.

Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang pada aset tetap lainnya per 31 Desember 2024.

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi  
Penyusutan Aset  
Tetap  
Rp11.173.113.523

C.8. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar

Rp11.173.113.523 dan Rp10.422.342.550. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	7.467.724.304	6.785.751.695	681.972.609
2	Gedung dan Bangunan	19.135.352.400	4.387.361.828	14.747.990.572
<b>Jumlah</b>		<b>26.603.076.704</b>	<b>11.173.113.523</b>	<b>15.429.963.181</b>

*Aset Tak Berwujud*  
Rp58.936.310

### **C.9. Aset Tak Berwujud**

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp58.936.310 dan Rp63.936.310. Aset tak berwujud ini merupakan Software komputer.

*Aset Lain-lain Rp0*

### **C.10. Aset Lain-lain**

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp241.654.000. Aset lain-lain ini berasal dari BMN yang dihentikan penggunaannya dan saat ini sedang diajukan usulan permohonan penghapusan kepada Pengguna Barang.

*Akumulasi  
Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya*  
Rp58.936.310

### **C.11. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya**

Nilai Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp58.936.310 dan Rp305.352.310.

*Uang Muka KPPN*  
Rp0

### **C.12. Uang Muka KPPN**

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara

Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

*Utang kepada  
Pihak Ketiga  
Rp9.261.707*

#### **C.13. Utang kepada Pihak Ketiga**

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp9.261.707 dan Rp9.539.937. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

*Pendapatan  
Diterima Dimuka  
Rp45.534.521*

#### **C.14. Pendapatan Diterima Dimuka**

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp45.534.521 dan Rp72.571.667. Pendapatan diterima dimuka adalah pendapatan yang diterima sebelum waktunya sehingga dicatat sebagai kewajiban.

*Ekuitas  
Rp85.929.046.454*

#### **C.15. Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp85.929.046.454 dan Rp87.240.843.531. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

### **D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

*Pendapatan PNB  
Rp61.553.318*

#### **D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp61.553.318 dan Rp74.314.792. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak  
per 31 Desember 2024 dan 2023*

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	61.553.318	74.314.792
<b>Jumlah</b>	<b>61.553.318</b>	<b>74.314.792</b>

Beban Pegawai  
Rp10.854.368.965

#### **D.2. Beban Pegawai**

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp10.854.368.965 dan Rp9.242.474.927. Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang diperkerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Rincian Beban Pegawai*

*Per 31 Desember 2024 dan 2023*

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	10.854.368.965	9.242.474.927
<b>Jumlah</b>	<b>10.854.368.965</b>	<b>9.242.474.927</b>

Beban Persediaan  
Rp62.115.950

#### **D.3. Beban Persediaan**

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp62.115.950 dan Rp111.792.800. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

*Rincian Beban Persediaan*

*Per 31 Desember 2024 dan 2023*

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Barang Konsumsi	62.115.950	111.792.800
<b>Jumlah</b>	<b>62.115.950</b>	<b>111.792.800</b>

Beban Barang dan  
Jasa  
Rp1.500.879.644

**D.4. Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.500.879.644 dan Rp1.511.701.149. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa  
Per 31 Desember 2024 dan 2023*

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Beban Belanja Barang Operasional	1.184.186.740	1.213.741.030
Beban Belanja Barang Non Operasional	0	4.530.000
Beban Langganan Daya dan Jasa	315.693.904	286.995.119
Beban Aset Ekstrakomtabel	999.000	6.435.000
Jumlah	1.500.879.644	1.511.701.149

Beban  
Pemeliharaan  
Rp1.077.323.329

**D.5. Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.077.323.329 dan Rp810.724.875. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan  
Per 31 Desember 2024 dan 2023*

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	677.443.029	366.280.799

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	70.982.000	60.996.850
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	328.898.300	383.447.226
<b>Jumlah</b>	<b>1.077.323.329</b>	<b>810.724.875</b>

Beban Perjalanan  
Dinas Rp34.076.947

#### **D.6. Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp34.076.947 dan Rp51.803.440. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas  
31 Desember 2024 dan 2023*

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Beban Perjalanan Dinas Biasa	32.456.947	51.803.4400
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	300.000	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.320.000	0
<b>Jumlah</b>	<b>34.076.947</b>	<b>51.803.440</b>

Beban Penyusutan  
dan Amortisasi  
Rp1.442.596.803

#### **D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.442.596.803 dan Rp1.437.312.352. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi karena adanya penyusutan untuk aset tetap dan amortisasi untuk aset tak berwujud. Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi  
31 Desember 2024 dan 2023*

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2024	31 Desember 2023
--------------------	------------------	------------------

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	827.561.723	863.346.972
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	613.785.080	573.965.380
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	1.250.000	0
<b>Jumlah</b>	<b>1.442.596.803</b>	<b>1.437.312.352</b>

## **E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

*Ekuitas Awal*  
*Rp87.240.843.531*

### **E.1. Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp87.240.843.531 dan Rp86.212.784.901.

*Defisit LO*  
*Rp14.874.029.012*

### **E.2. Defisit LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp14.874.029.012 dan Rp13.086.944.751. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

### **E.3.**

*Penyesuaian Nilai Aset*  
*Rp0*

#### **E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset**

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai Persediaan*  
*Rp0*

#### **E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0.

*Selisih Revaluasi Aset Tetap*  
*Rp0*

#### **E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap**



Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0.

Selisih revaluasi Aset Tetap tersebut berasal dari penilaian ulang atas tanah, gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan berupa jalan jembatan dan bangunan air.

Koreksi Nilai Aset  
Tetap Non  
Revaluasi  
Rp3.881.700

E.3.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.881.700 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Lain-  
lain Rp0

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar  
Entitas  
Rp13.566.113.635

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp13.566.113.635 dan Rp14.115.003.381.

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Nilai Transaksi antar Entitas

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(70.533.480)
Ditagihkan ke Entitas Lain	13.540.519.965
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	(2.718.000)

Pengesahan Hibah Langsung	2.428.849.000
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	98.845.150
<b>Jumlah</b>	<b>13.566.113.635</b>

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

**E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar Rp70.533.480 sedangkan DKEL sebesar Rp13.540.519.965.

**E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar**

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Hingga tanggal 31 Desember 2024 terdapat tidak terdapat Transfer Masuk dan terdapat Transfer Keluar sebesar Rp2.718.000.

**E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung**

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Hingga tanggal 31 Desember 2024 terdapat Pengesahan Hibah Langsung sebesar Rp98.845.150.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Tidak ada Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ekuitas Akhir  
Rp85.929.046.454

**E.5. Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp85.929.046.454 dan Rp87.240.843.531.

**F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA**

**F.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

**F.2. REVISI DIPA**

Hingga tanggal 31 Desember 2024, Pengadilan Negeri Samarinda melakukan Revisi DIPA sebanyak 7 (tujuh) kali dengan rincian jenis revisi :

1. Ralat rencana penarikan dana (Hal III DIPA), dan Revisi POK (7 Februari 2024),
2. Ralat rencana penarikan dana (Hal III DIPA), dan Revisi POK (3 April 2024),
3. Ralat rencana penarikan dana (Hal III DIPA), dan Revisi POK (7 Juni 2024)
4. Ralat rencana penarikan dana (Hal III DIPA), dan Revisi POK (13 Juli 2024)
5. Ralat rencana penarikan dana (Hal III DIPA), dan Revisi POK (9 Oktober 2024)
6. Ralat rencana penarikan dana (Hal III DIPA), dan Revisi POK (4 Desember 2024)
7. Ralat rencana penarikan dana (Hal III DIPA), dan Revisi POK (12 Desember 2024)

**F.3. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**

Tidak terdapat kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan MONSAKTI.